

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN ITSBAT NIKAH
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (Studi Analisis Penetapan
Hakim Pengadilan Agama Talu No. 411/Pdt.P/2017/PA.Talu)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Jurusan Hukum Keluarga Islam



Oleh :
RAFIKA RUSYDA
1413010191

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL
PADANG
2018 M/ 1439 H

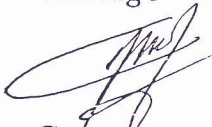
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan judul "Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Itsbat Nikah Perkawinan di Bawah Umur (Studi Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Talu Perkara Nomor 411/Pdt.P/2017/PA.Talu)". Disusun oleh Rafika Rusyda NIM. 1413010191, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 02 Agustus 2018.

Pembimbing I



Dra. Gusnida, M.Ag
NIP. 19530814 198503 2 001

Pembimbing II



Dr. Elfia, M.Ag
NIP.19790317 200501 2 006

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Itsbat Nikah Perkawinan di Bawah Umur (Studi Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Talu No. 411/Pdt.P/2017/PA.Talu)”**, ditulis oleh Rafika Rusyda, Bp. 1413010191 pada Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Keluarga Islam. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh penetapan Pengadilan Agama Talu Nomor 411/Pdt.P/2017/PA.Talu, yaitu perkara itsbat nikah perkawinan di bawah umur. Duduk perkara ringkasnya ialah Hakim mengabulkan penetapan itsbat nikah perkawinan di bawah umur tanpa melalui dispensasi nikah terlebih dahulu, secara tidak langsung penetapan ini telah mengizinkan terjadinya pernikahan di bawah umur dengan mengenyampingkan kewenangan pengadilan agama dalam proses dispensasi nikah yang seharusnya ditempuh sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 2. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pertanyaan penelitian penulis yaitu: 1) Apa dasar hukum hakim Pengadilan Agama Talu dalam penetapan perkara Nomor 411/Pdt.P/2017/PA.Talu tentang itsbat nikah pernikahan di bawah umur ?, 2) Bagaimana penetapan hakim tersebut ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ?. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum normatif (*legal research*). Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan; *pertama*, pertimbangan hakim dalam penetapan perkara Nomor 411/Pdt.P/2017/PA.Talu tentang itsbat nikah perkawinan di bawah umur yang tidak menepati dispensasi nikah ialah berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam. Majelis hakim tidak menjadikan umur para pihak sebagai pertimbangan karena dalam permohonan itsbat nikah, batasan umur tidak dijadikan syarat. *Kedua*, bahwa tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 bukan merupakan halangan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tetapi itu merupakan syarat dari perkawinan. Adapun maksud halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut ialah terdapat dalam pasal 8 Undang-undang No 1 Tahun 1974.

Kata kunci: Itsbat nikah, Pernikahan, Pertimbangan hakim

ABSTRACT

This thesis is entitled "**Review of Law Number 1 of 1974 on Judges' Consideration in Establishing Underage Marriage Matters (Analysis Study of the Determination of Talu Religious Court Judges No. 411 / Pdt.P / 2017 / PA.Talu)**", written by **Rafika Rusyda, Bp 1413010191** at the Syari'ah Faculty of Islamic Family Law. This writing was motivated by the determination of the Talu Religious Court Number 411 / Pdt.P / 2017 / PA. Then, namely the case of itsbat underage marriage. Sitting in its brief case, the Judge granted the determination of his underage marital marriage without going through marriage dispensation first, indirectly this stipulation allowed the occurrence of underage marriage by waiving the authority of the religious court in the marriage dispensation process which should be taken in accordance with Law No. . 1 of 1974 concerning marriage article 7 paragraph 2. Based on the above background, the authors' research questions are: 1) What is the legal basis of the Religious Court judge in determining case No. 411 / Pdt.P / 2017 / PA. underage marriage?, 2) How is the determination of the judge reviewed from Law No. 1 of 1974? In this study, the author conducted normative legal research (legal research). Based on the results of the research that the writer did, it can be concluded; First, the judge's consideration in the determination of case Number 411 / Pdt.P / 2017 / PA. The issue about itsbat underage marriage that does not take marriage dispensation is based on Article 7 paragraph (2) and (3) letter e Compilation of Islamic Law. The panel of judge does not make the age of the parties as a consideration because in the application for itsbat marriage the age limit is not used as a condition. Second, that the review of Law No. Article 1 of 1974 concerning marriage article 7 is not a marriage obstacle referred to in Law No. 1 of 1974 concerning marriage but that is a condition of marriage. The purpose of marriage obstacles according to Law No. 1 of 1974 is contained in article 8 of Act No. 1 of 1974

Keywords: Its marriage, marriage, judge's consideration